

## Kebijakan “Revolusi Hijau” Paman Birin dalam Menjaga Kerusakan Lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan

### *"Green Revolution" Governor Policy in Maintaining Environmental Damage in the Province of South Kalimantan*

Samahuddin Muharram

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia.  
E-mail: samahuddin\_m@yahoo.com

#### ARTICLE INFO

**Keywords:** policy, green-revolution, environment, destruction, welfare, revitalization

**Kata kunci:** kebijakan, revolusi hijau, lingkungan, kerusakan, kesejahteraan, revitalisasi

**How to cite:**  
Muharram, S. (2020). Kebijakan “Revolusi Hijau” Paman Birin dalam Menjaga Kerusakan Lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 6(1), 49-64.

#### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Uncle Biring's "green revolution" policy in South Kalimantan. This research was conducted using qualitative methods with data collection methods using interviews and document studies. The researcher interviewed 10 key informants who understood and were involved in environmental policy in the province of South Kalimantan. The data analysis method used is an interpretative qualitative approach. This research identifies the results of the research as follows: a. That the aim of promoting a green revolution is to preserve the environment in the future and to improve the welfare of the community, b. Provide employment for farmers and agricultural laborers, c. attempt to restore the damage to this forest and land area as part of efforts to make the South Kalimantan region one of the lungs of the world, d. as the Governor of South Kalimantan always provides high support and appreciation for any greening activities, both carried out by the Regency Government and related SKPD as well as NGOs and the community, e. revitalize the permanent nursery to be used so that millennial generation can educate nurseries and support the Green Revolution in South Kalimantan, f. Renewing itself with the movement to plant a million trees must continue to be encouraged and maintained. Forestry development must be increasingly directed towards increasing forest use for domestic industries, so as to produce added value and create maximum employment

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan “revolusi hijau” Paman Biring di Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Peneliti mewawancarai 10 informan kunci yang memahami dan terlibat dalam kebijakan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif interpretative. Penelitian ini mengidentifikasi hasil riset sebagai berikut. a. Bahwa tujuan digalakkan revolusi hijau, demi menjaga lingkungan ke depan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, b. Memberikan lapangan kerja bagi para petani maupun buruh pertanian, c. berupaya melakukan pemulihan kerusakan

---

*kawasan hutan dan lahan ini sebagai bagian dari upaya menjadikan daerah Kalimantan Selatan sebagai salah satu paru-paru dunia, d. selaku Gubernur Kalimantan Selatan selalu memberikan dukungan dan apresiasi yang tinggi pada setiap ada kegiatan penghijauan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan SKPD terkait maupun LSM serta masyarakat, e. melakukan revitalisasi persemaian permanen untuk dimanfaatkan agar generasi milenial dapat melakukan edukasi pembibitan dan mendukung Revolusi Hijau di Kalimantan Selatan, f. Memperbaharui diri dengan gerakan menanam sejuta pohon harus terus menerus digalakkan dan terpelihara. Pembangunan kehutanan harus makin diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan hutan bagi industri dalam negeri, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya.*

---

## **Pendahuluan**

Gagasan revolusi hijau bermula dari hasil penelitian dan tulisan Thomas Robert Malthus (1766 – 1834) yang mengemukakan bahwa masalah kemiskinan dan kemelaratan adalah masalah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Kemiskinan dan kemelaratan terjadi karena pertumbuhan penduduk dan peningkatan produksi pangan tidak seimbang. Pertumbuhan penduduk berjalan lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan produksi pertanian (pangan). Menurut Malthus pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan peningkatan produksi pertanian mengikuti deret hitung.

Tulisan Malthus itu telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat eropa sehingga memunculkan gerakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan penelitian bibit unggul untuk menambah jumlah produksi pangan. Dengan menekan jumlah penduduk dan pemakaian bibit unggul yang mampu melipatgandakan hasil pertanian diharapkan akan mampu mengatasi masalah kemiskinan dan kemelaratan.

Sejak dimulainya Perang Dunia I banyak lahan-lahan pertanian yang dihancurkan karena menjadi area perang, terlebih lagi beberapa dekade sebelumnya telah banyak lahan pertanian yang beralih menjadi lahan industri sejak munculnya revolusi industri. Hal ini telah mengancam produktifitas pangan di berbagai wilayah di eropa. Revolusi hijau dimulai sejak berakhirnya PD I yang berakibat hancurnya lahan pertanian.

Demikian juga setelah Perang Dunia II berakhir, revolusi hijau menjadi semakin giat untuk menggunakan metode-metode pertanian demi meningkatkan hasil pertanian yang telah terbukti berhasil di beberapa negara seperti india dan filipina serta di beberapa negara berkembang lainnya. Sedangkan di Indonesia upaya pelaksanaan revolusi hijau telah dimulai sejak rezim orde baru dalam program pembangunan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menulis makalah ini untuk melihat bagaimanakah penerapan revolusi hijau di Indonesia serta hasil dan dampak yang ditimbulkan dengan pelaksanaan revolusi hijau tersebut.

Sedangkan di Indonesia upaya pelaksanaan revolusi hijau telah dimulai sejak rezim orde baru dalam program pembangunan. Sejak orde baru berkuasa

telah banyak perubahan yang dicapai oleh bangsa Indonesia melalui tahap-tahap pembangunan di segala bidang. Pemerintah orde baru berusaha meningkatkan peran negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah menciptakan stabilitas ekonomi politik. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Sejalan dengan perkembangan dari dekade ke dekade, konsep “revolusi hijau” mengalami perkembangan dan permasalahan yang begitu kompleks, bukan hanya pada soal pertanian dan peningkatan ketahanan pangan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi sudah mulai bergeser ke soal *global warming* terutama terkait soal polusi dan lingkungan hidup. Di Indonesia pun mengalami soal polusi dan lingkungan hidup merupakan persoalan yang sangat serius untuk diselesaikan dalam bentuk kebijakan (Hardjosoemantri, 1997). Hampir semua provinsi di Indonesia mengalami persoalan polusi dan lingkungan yang membutuhkan perhatian oleh pemerintah.

Di Kalimantan Selatan khususnya, soal lingkungan hidup merupakan persoalan yang butuh kebijakan strategis dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan ini. Mengingat di Propinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah pertambangan, yang tentu saja akan menimbulkan efek atau kerusakan terhadap lingkungan, sehingga membutuhkan kebijakan yang strategis dan konseptual dalam menyelesaikan soal kerusakan yang diakibatkan oleh sector pertambangan ini.

Dalam hal ini, Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, membuat kebijakan “Revolusi Hijau” dalam rangka menangani soal lingkungan hidup. Program “revolusi hijau” terus menerus digelorkannya di Kalimantan Selatan. Revolusi hijau untuk menjadikan Kalimantan Selatan makin hijau lestari dengan lingkungan yang tertata kembali. Ia mendorong pelestarian lingkungan harus dijaga bersama.

Gerakan revolusi hijau yang digaungkan tak melulu soal kegiatan menanam, tapi lebih utama soal revolusi mental dan cara pandang, sehingga diharapkan terjadi perubahan dan perbaikan kearah yang semakin baik. Pemerintah Kalimantan Selatan akan memperbaiki Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia. Gerakan penanaman pohon besar-besaran yang disebut Revolusi Hijau menjadi salah satu program utama yang ingin dicapai dalam keberhasilan pembangunan bidang kehutanan di Kalimantan Selatan. Sehingga Program Revolusi Hijau yang digalakkan Pemprov Kalimantan Selatan diharapkan bisa menjadi percontohan bagi provinsi lain di Indonesia.

Kebijakan “Revolusi Hijau” berupa kegiatan penanaman pohon besar-besaran bertujuan untuk mengurangi luasan lahan kritis, pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Revolusi Hijau diharapkan bisa mengurangi luas lahan kritis di Kalimantan Selatan beberapa tahun kedepan.

Gerakan "Revolusi Hijau" merupakan program prioritas permanen bagi Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan (Bappeda Prov Kalimantan Selatan, 2017). Revolusi Hijau merupakan program yang akan selalu menjadi prioritas, dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan melalui "Gerakan Ayo Menanam, Menanam dan Menanam untuk Anak Cucu Kita". Dari data yang ada, luas lahan kritis di Kalimantan Selatan berdasarkan data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito Tahun 2015, mencapai 640.708 Hektar (Bappeda Prov Kalimantan Selatan, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : "Bagaimana kebijakan revolusi hijau Paman Birin dalam menjaga kerusakan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan?".

## Kajian Literatur

### *Pengertian Kebijakan Publik*

Secara umum, istilah 'kebijakan publik' atau "*policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah), atau sejumlah actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relative memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik (Winarno, 2014:19).

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone (Winarno, 2014:20), mengatakan bahwa "*secara luas*" kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya". Namun pengertian ini, mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik menurut Dun (2003) dan Ficher et al, (2015) bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan yang diberikan kedua pakar tersebut ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilaklkan oleh pemerintah.

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu (Abidin, 2016). Hal ini dilakukan, karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai (Abidin, 2008). Oleh karena itu, definisi mengenai kebijakan public akan lebih tepat definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-

mata menyangkut usulan tindakan. Berdasarkan pada pertimbangan seperti ini, maka definisi kebijakan public yang ditawarkan James Anderson, lebih tepat dibandingkan dengan definisi-definisi kebijakan public yang lain. Menurut Anderson (Winarno, 2014:21) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

### ***Konsep dan Gagasan Revolusi Hijau***

Revolusi hijau atau revolusi agraria adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian (Suharto, 2008). Definisi lain menyebutkan revolusi hijau adalah revolusi produksi biji-bijian dari penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari varietas gandum, padi, jagung yang membawa dampak tingginya hasil panen. Tujuan revolusi hijau adalah meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara penelitian dan eksperimen bibit unggul.

Perkembangan revolusi hijau yang semakin bertambah pesat, juga berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya meningkatkan ekonomi dari sektor pertanian yang disebabkan oleh kesadaran akan kebutuhan penduduk yang meningkat dengan pesat, tingkat produksi pertanian yang masih sangat rendah, dan karena produksi pertanian belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan penduduk, maka upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menggalakan revolusi hijau ditempuh dengan cara : *Intensifikasi Pertanian*, kegiatan pengembangan produksi hasil pertanian yaitu dengan menerapkan teknologi tepat guna (panca usaha Tani) untuk tiap luas tanah pertanian. *Ekstensifikasi Pertanian*, ekstensifikasi pertanian, yaitu memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru (misalnya mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami, membuka hutan, dan sebagainya). *Diversifikasi Pertanian*, usaha penganekaragaman jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui sistem tumpang sari. Usaha ini menguntungkan karena dapat mencegah kegagalan panen pokok, memperluas sumber devisa, mencegah penurunan pendapatan para petani.

Revolusi hijau mendapat kritik sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan karena mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Oleh para pendukungnya, kerusakan dipandang bukan karena Revolusi Hijau tetapi karena eksekusi dalam penggunaan teknologi yang tidak memandang kaidah-kaidah yang sudah ditentukan.

Namun dalam penelitian ini, penulis membatasi Gagasan dan Konsep Revolusi Hijau pada persoalan lingkungan yang diakibatkan oleh pertanian,

pekebunan dan kehutanan serta pertambangan, sehingga membutuhkan perhatian melalui kebijakan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Apa yang menjadi dampak terhadap sektor tersebut yang kemudian menjadi perhatian penulis dalam hal pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah-langkah kebijakan dalam menjaga kerusakan lingkungan hidup akibat dari pekebunan dan kehutanan serta pertambangan.

Pengertian revolusi hijau adalah usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Mengubah dari pertanian yang tadinya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian yang menggunakan teknologi lebih maju atau modern.

Revolusi hijau juga mendapatkan kritik dari pihak-pihak yang mempunyai kesadaran akan kelestarian lingkungan karena telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah (Theresia, et al., 2014). Oleh mereka yang mendukung revolusi industri, mereka menyebutkan bahwa kerusakan tersebut bukan karena revolusi industri tapi karena akses dalam penggunaan teknologi yang tidak memandang kaidah-kaidah yang sudah ditentukan.

Revolusi hijau mendapat kritik sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan karena mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Oleh para pendukungnya, kerusakan dipandang bukan karena Revolusi Hijau tetapi karena akses dalam penggunaan teknologi yang tidak memandang kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Selain kritik tersebut di atas masih ada kritik lain lagi yaitu Revolusi Hijau tidak dapat menjangkau seluruh strata negara berkembang karena ia tidak memberi dampak nyata di wilayah Afrika.

### ***Konsep Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup***

Menurut Emil Salim, istilah lingkungan hidup yaitu mengacu pada semua benda, keadaan, kondisi dan juga pengaruh yang ada dalam ruangan yang sedang kita tinggali dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan di sekitarnya baik itu hewan, tumbuhan maupun manusia (Cornea, 1988). Sedangkan menurut kamus ekologi, istilah lingkungan hidup (*environment*) mengacu kepada keseluruhan yang saling berkaitan antara makhluk hidup dan non hidup yang berada secara alamiah bumi atau di sebagian daerahnya. Menurut UU NO. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dari pengertian tersebut, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen di sekitarnya, komponen lingkungan ini meliputi komponen fisik, kimia, social budaya, dan komponen lainnya.

Ada kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam usaha melestarikan lingkungan ini. Beberapa penyebabnya antara lain (Fatah, 2007:285-286) :

1. Pendapat bahwa bertambahnya pencemaran lingkungan hanyalah sedikit demi sedikit, sehingga tambahan berikutnya tidak berarti.
2. Adanya pihak-pihak yang menentang adanya kebijaksanaan terhadap lingkungan, karena merasa bahwa kegiatan-kegiatannya dibatasi.
3. Adanya pihak-pihak yang selalu berpegang pada hal-hal yang tradisional dan menentang adanya perubahan-perubahan.
4. Adanya pihak-pihak yang menolak penggunaan intensif ekonomis untuk maksud-maksud perlindungan lingkungan dan menganggap hal tersebut sehingga hal yang amoral.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila ada sinyal bahwa kualitas lingkungan makin menurun dan bahwa lingkungan hidup manusia disalahgunakan atau disalah manfaatkan dan apabila ditelaah lebih lanjut rusaknya lingkungan merupakan hal yang terjadi pada struktur ekonomi masyarakat dalam waktu dekat ini ataupun diwaktu-waktu yang akan datang apabila proses pembangunan serta usaha-usaha pelestarian lingkungan tidak diawasi secara konsekuen.

Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata lain lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia makan dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dari lingkungan hidupnya manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan, tumbuhan air, udara, sinar matahari, garam kayu, dan lain-lain. Makhluk hidup yang lain seperti binatang-binatang mikroba serta tumbuhan juga bisa hidup karena lingkungan hidupnya. Dari lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga, manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhan nya sendiri berupa hasrat atau keinginan.

Dalam UU NO. 32 Tahun 2009 Pasal 4 sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup.
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- f. Terlindungnya Negara kesatuan republic Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup semula berada dalam keseimbangan dan keserasian karena komponen- komponen ekosistem penyangga kehidupan berfungsi dengan baik dan sebagai mana mestinya. Meskipun ada permasalahan lingkungan, tetapi intensitasnya tidak pernah, sehingga masih dalam batas-batas kemampuan lingkungan lingkungan untuk memulihkan diri.

### ***Kebijakan Lingkungan Sahbirin Noor (Gubernur Kalimantan Selatan)***

Gubernur Sahbirin Noor atau yang lebih dikenal dengan "Paman Birin". Gaya kepemimpinannya dibentuk dari proses panjang perjalanan hidupnya yang ditempa dengan kegetiran. Apa yang diraih Paman Birin saat ini menurut Raudatul Jannah, tak diperolehnya dengan instan. Tapi dicapai dengan susah payah. Dari keluarga kecil dengan tiga orang anak, Paman Birin harus merintis dari nol. Sebelum menjadi orang nomor satu di Propinsi Kalimantan Selatan, apapun pekerjaan halal dilakoni sang suami. Raudatul menceritakan, untuk menghidupi keluarga kecilnya, sang suami pernah menjadi buruh angkut di pelabuhan. Tak hanya itu, Paman Birin juga melakoni pekerjaan keras sebagai penjaga parkir. Bahkan, terkadang Paman Birin menjadi penjaga malam di kampung hingga menjadi penarik ojek.

Meski bergelut dengan pekerjaan keras tersebut. Paman Birin memiliki kemauan tinggi dalam pengembangan diri. Dia mengikuti berbagai organisasi. Hal ini inilah yang membentuk sosok Sahbirin Noor menjadi seorang pemimpin yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan pekerja keras. "Keyakinan dan sikap optimismenya selalu menular ke keluarga."

Pernah menjalani kehidupan yang getir inilah membuat Paman Birin selalu dekat dengan rakyatnya. Dirinya acap kali ketika menemui warga tanpa ada batasan. Pola kepemimpinannya ini sudah menjadi hal biasa bagi seorang Sahbirin. Masuk ke hutan hingga membaur dengan para petani, pedagang hingga masyarakat biasa kerap dilakukannya.

Selama kepemimpinan beliau sangat focus akan masalah-masalah lingkungan, sehingga membuat gagasan dengan Konsep 'Revolusi Hijau'. Gagasan Revolusi Hijau sebagai sebuah kebijakan oleh Paman Birin lebih terkait soal cara pandang dan revolusi mental akan kerusakan soal lingkungan. Bukan semata-mata hanya urusan pertanian. Program Revolusi Hijau ini diisi kegiatan penanaman pohon besar-besaran untuk mengurangi lahan kritis dan memulihkan daerah aliran sungai (DAS), serta memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Paman Birin, berupaya melakukan pemulihan kerusakan kawasan hutan dan lahan ini sebagai bagian dari upaya menjadikan daerah Kalimantan Selatan sebagai salah satu paru-paru dunia.

Kemudian program revolusi hijau terus menerus disosialisasikan oleh Paman Birin, mengingat belakangan ini kondisi lingkungan Kalimantan Selatan sudah memprihatinkan, karena kerusakan yang terus bertambah, sementara perbaikan atau rehabilitasi lahan kurang maksimal. Sehingga Program Revolusi



Hijau ini diharapkan bisa efektif dalam mengurangi dan meningkatkan kualitas lingkungan di Kalimantan Selatan, walaupun sesungguhnya Perda Terkait soal Lingkungan sudah ada. Kebijakan Revolusi Hijau Paman Birin, setiap tahunnya ditargetkan penanaman hingga 32 ribu hektare untuk mengurangi lahan kritis. Sehingga nanti, keberhasilan program ini bisa berpengaruh membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Selatan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipergunakan dalam penelitian ini, karena peneliti ingin mengamati dan terlibat langsung dalam pantauan program revolusi hijau ini. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Sumber data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data dan informan penelitian dipilih dan mengutamakan perspektif emic, artinya mementingkan pandangan informan, yaitu bagaimana mereka memandang dan menafsirkan kebijakan dan program yang mereka buat (Gulo, 2010). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. Peneliti mewawancarai 10 informan kunci yang terlibat dan memahami kebijakan lingkungan di Kalimantan Selatan. Peneliti melakukan studi dokumen terkhusus pada dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, dokumen lain adalah kebijakan-kebijakan baik nasional maupun provinsi yang terkait dengan lingkungan hidup.

Dalam penelitian ini, instrument penelitian yang utama adalah peneliti sendiri, dengan mengembangkan instrument penelitian sederhana, yang dapat mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan dan observasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep Miles dan Huberman serta Spradly (Sugiyono: 2007). Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.

### **Hasil dan Pembahasan**

Upaya penyelamatan lahan kritis dan pelestarian lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam Gerakan Revolusi Hijau semakin masif digalakan. Semua komponen masyarakat, instansi pemerintah, swasta, generasi muda, mahasiswa dan pelajar turut berpartisipasi. Seperti Persemaian Permanen seluas 5 hektar dari Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL)

Barito Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Instansi vertikal ini setiap tahunnya menyiapkan satu juta bibit untuk disemai. Hasil semai yang sudah jadi batang pohon dibagikan ke masyarakat secara gratis.

Menurut Paman Birin pada kegiatan revolusi hijau mengatakan, bahwa tujuan digalakkan revolusi hijau, demi menjaga lingkungan ke depan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gubernur juga mengapresiasi jenis batang pohon yang ditanam adalah jenis tanaman rakyat seperti, sengon, trembesi serta tanaman buah di antaranya pete, alpokat, kasturi dan pohon jati. Masih kata Sahbirin wilayahnya berupaya melakukan pemulihan kerusakan kawasan hutan dan lahan ini sebagai bagian dari upaya menjadikan daerah Kalimantan Selatan sebagai salah satu paru-paru dunia.

Pada kesempatan yang sama "Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan Hanif Faisol Nurofiq merasa sangat terbantu dengan dukungan BPDASHL tahun ini dengan 83 titik persemaian semi permanen yang memproduksi 3,2 juta hektar. Untuk Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan sendiri memiliki 11 persemaian semi permanen dengan produksi rata-rata 500 ribu bibit. Kemudian akan produksi 5 juta bibit pertahunnya. Diharapkan dapat mencukupi kebutuhan Revolusi Hijau yang saat ini sedang ramai di masyarakat."

Untuk mendukung upaya itu Kementerian LHK pada tahun 2019 mengucurkan anggaran Rp 80 miliar untuk program rehabilitasi hutan seluas 8.300 ha. Program itu ditargetkan selesai dalam tiga tahun ke depan. Pemerintah memberikan apresiasi atas keberhasilan Kalimantan Selatan Menurut Paman Birin pada kegiatan revolusi hijau mengatakan, bahwa tujuan digalakkan revolusi hijau, demi menjaga lingkungan ke depan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gubernur juga mengapresiasi jenis batang pohon yang ditanam adalah jenis tanaman rakyat seperti, sengon, trembesi serta tanaman buah di antaranya pete, alpokat, kasturi dan pohon jati. Masih kata Sahbirin wilayahnya berupaya melakukan pemulihan kerusakan kawasan hutan dan lahan ini sebagai bagian dari upaya menjadikan daerah Kalsel sebagai salah satu paru-paru dunia.

Paman Birin selaku Gubernur Kalimantan Selatan selalu memberikan dukungan dan apresiasi yang tinggi pada setiap ada kegiatan penghijuan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan SKPD terkait maupun LSM serta masyarakat. Misalnya pada kegiatan yang dilaksanakan oleh BPDASHL Barito yang bekerja sama dengan instansi daerah dan pusat yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan menebar bibit dan melakukan penanaman, Paman Birin datang langsung ikut dan berpartisipasi menanam pohon. Paman Birin bersama Kadishut Kalimantan Selatan Hanif Faisol Nurofiq, Kepala Balai Pengelolaan BPDASHL Barito Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Zainal Arifin turut melakukan penanaman pohon.

Menurut Zainal Arifin, revitalisasi persemaian permanen ini dimanfaatkan agar generasi milenial untuk edukasi pembibitan dan mendukung Revolusi Hijau di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, menurutnya:

*"Kami mensupport program Revolusi Hijau yang digerakkan Gubernur Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan kapasitas persemaian produksi 1 juta batang pertahunnya yang diberikan gratis kepada masyarakat". (kutipan interview tanggal 10 Oktober 2019)*

Diketahui total jumlah pembibitan di Kaliman Selatan sebanyak 2 juta hektar dengan 250 juta batang setahun atau senilai dengan Rp 2,2 miliar untuk mendukung pembibitan gratis kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Dalam melaksanakan pembangunan di sektor kehutanan melalui program Revolusi Hijau. Program tersebut berhasil mengurangi luas lahan kritis di Kalimantan Selatan dari 649.000 hektare menjadi 511.000 hektare dalam tiga tahun terakhir. Sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menjadikan program ini sebagai program nasional bidang kehutanan. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun menyampaikan apresiasi atas kemajuan konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kalimantan Selatan yang dinilai cukup cepat.

Dari pernyataan Kadis Kehutanan pada salah satu kegiatan revolusi hijau mengatakan, bahwa Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan menargetkan pemulihan kerusakan kawasan hutan dan lahan ini sebagai upaya menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu paru-paru dunia. Setiap tahun kegiatan penanaman pohon yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat mencapai lebih 35 ribu hektar. Saat ini IKLH Kalimantan Selatan meningkat dari posisi 26 menjadi 19. Menurut Kadis Kehutanan, konsep revolusi hijau adalah bagaimana menciptakan hutan dan potensi di dalamnya dapat menyejahterakan masyarakat dengan mengedepankan pelestarian lingkungan.

Disamping dukungan Pemerintah Kabupaten dan SKPD, serta Masyarakat, dukungan dari TNI-Polri dinilai berhasil dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) khususnya lahan gambut di wilayah Guntung Damar, Kota Banjarbaru atau sekitar bandara Syamsuddin Noor. Melalui inovasi pembuatan kanalisasi dengan sistem buka tutup saluran irigasi sekunder Cindai Alus, Kabupaten Banjar. Kegiatan pembasahan lahan gambut ini dengan cara mengalirkan air ke areal lahan gambut yang terbakar seluas 900 hektar.

Menurut Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan program Revolusi Hijau telah berhasil mengurangi luas lahan kritis di Kalimantan Selatan dari 649.000 hektare menjadi 511.000 hektare dalam tiga tahun terakhir. Program itu berupa kegiatan penanaman pohon besar-besaran untuk mengurangi lahan kritis, memulihkan daerah aliran sungai (DAS), serta memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Keberhasilan ini juga berpengaruh pada kian membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup Kalimantan Selatan dari peringkat 26 menjadi 19 dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Paman Birin bahwa:

*"Setiap tahun ditargetkan penanaman hingga 32 ribu hektare untuk mengurangi lahan kritis. Sekarang kita membangun pusat persemaian dan*

*pembibitan modern di sejumlah wilayah"* (kutipan interview tanggal 8 Oktober 2019)

Menurut Paman Birin pada pemaparan LKPJ Tahun Anggaran 2019 di DPRD Propinsi Kalimantan Selatan, bahwa:

*"Di bidang lingkungan hidup, program revolusi hijau yang terus dikerjakan, membuahkan hasil yang cukup baik". Kualitas lingkungan hidup di Bumi Lambung Mangkurat dari tahun ke tahun semakin membaik. Nilai indeks kualitas lingkungan hidup Kalsel naik dari 61,47 di tahun 2018 menjadi 62,06 di tahun 2019. Capaian ini atas usaha terus-menerus melakukan penanaman pohon di lahan kritis baik hutan lindung maupun hutan produksi."* (kutipan interview tanggal 8 Oktober 2018)

Hal ini dibenarkan oleh informan Hanif selaku Kadis Kehutanan Kalimantan Selatan, mengatakan bahwa:

*"... kawasan hutan Kalsel memiliki luas keseluruhan sekitar 1,7 juta hektar. Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan menargetkan dengan program revolusi hijau ini bakal memperbaiki lahan kritis seluas 500 hektar lebih. Penanaman dilakukan di lahan kritis hutan lindung, hutan produksi hingga kawasan non hutan. Target per tahun dilakukan penanaman di areal kritis seluas 30 ribu hektar lebih."* (kutipan interview tanggal 15 Oktober 2019)

Di samping itu, Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan kini tengah berupaya mengembangkan sektor wisata alam Pegunungan Meratus dan menjadikan kawasan itu sebagai taman bumi dunia (*global geopark*) yang diakui UNESCO. Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan akan membangun pintu-pintu air secara permanen untuk mengaliri air sekat kanal dan embung. Sehingga saat terjadi kebakaran gambut cepat diatasi. Upaya pemadaman kebakaran lahan gambut dengan cara menenggelamkan kawasan gambut yang terbakar cukup berhasil.

Pemerintah Pusat memberikan apresiasi atas keberhasilan Kalimantan Selatan dalam pembangunan sektor kehutanan yang disebut program Revolusi Hijau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan menjadikan program ini sebagai program nasional bidang kehutanan. Pemerintah Pusat berterima kasih dan memberikan apresiasi atas keberhasilan Kalimantan Selatan dalam pembangunan bidang kehutanan yang disebut Revolusi Hijau. Apresiasi diberikan atas kemajuan konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kalimantan Selatan yang dinilai cukup cepat.

Indonesia sebagai Negara yang berkembang, yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, juga harus berorientasi pada pembangunan lingkungan. Pengertian pembangunan merupakan upaya sadar

bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 digariskan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan ;

- a. Perencanaan,
- b. Pemanfaatan,
- c. Pengendalian,
- d. Pemeliharaan,
- e. Pengawasan, dan
- f. Penegakkan hukum.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuensi dari pusat sampai ke bawah.

Adanya apresiasi yang makin meningkat, bahwa tujuan untuk menanggulangi pencemaran setelah pencemaran terjadi, dari sudut sosial kurang begitu diinginkan dibanding dengan pencegahan terjadi pencemaran. Pembangunan ekonomi yang mengelolah kekayaan alam, seperti kehutanan dan pertambangan, harus senantiasa memperhatikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, di samping untuk memberi kemanfaatan masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sumber daya alam yang terbarukan harus dikelola sedemikian rupa sehingga fungsinya dapat selalu terpelihara sepanjang masa.

Melalui gerakan revolusi hijau Paman Birin, agar kemampuannya untuk memperbaharui diri dengan gerakan menanam sejuta pohon harus terus menerus digalakkan dan terpelihara. Pembangunan kehutanan harus makin diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan hutan bagi industri dalam negeri, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya.

Pembangunan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan harus diarahkan untuk menghasilkan bahan tambang sebagai bahan baku bagi industri dalam negeri, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang setinggi-tingginya dan menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya di Kalimantan Selatan. Pembangunan sector ini harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wilayah, pembangunan daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kalimantan Selatan.

Kegiatan pada sektor yang mengelola sumber daya alam dari Bumi memiliki potensi untuk merusak lingkungan, baik air, tanah maupun udara. Oleh karena itu, harus selalu dijaga baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat agar kegiatan pembangunan di sector ini memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam penyelenggaraannya, mengingat Propinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah yang religius, harus senantiasa berpedoman pada nilai

agama, nilai budaya bangsa serta memperhatikan keterbatasan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat harus diupayakan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta senantiasa memperhitungkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi yang akan datang.

Pesatnya pembangunan membawa serta peningkatan keprihatinan masyarakat tentang dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pengembangan kapasitas lingkungan, sangat diperlukan karena pengembangan kapasitas usaha yang tidak terkendali dapat menjurus pada ketamakan dan kerakusan yang dapat merusak lingkungan (baik lingkungan fisik maupun sosialnya). Di Kalimantan Selatan ketamakan dan kerakusan pengusaha pertambangan dan perkebunan tidak lagi melihat kerusakan fisik semata tapi sudah juga menjurus kepada kerusakan sosial masyarakat. Selama ini, seringkali dimaknai sekedar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tetapi dalam praktek perlu disadari, bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan.

Adapun manfaat disamping menargetkan pemulihan kerusakan kawasan hutan dan lahan sebagai upaya menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu paru-paru dunia, juga dalam rangka rehabilitasi tanah kritis guna memulihkan dan mempertahankan kesuburan tanah, memelihara sumber air dan kelestarian fungsinya serta kemampuan daya dukung lingkungan dan fungsi lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan dan memberi manfaat bagi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, di Kalimantan Selatan, pemerintah daerah harus membuat kebijakan, dimana penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas lahan harus dapat menjamin kelangsungan usaha pertanian sebagai pekerjaan utama masyarakat. Kemudian kebijakan di sektor pertambangan, harus diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam tambang serta hemat dan optimal bagi pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri, bagi keperluan energi, dan bagi keperluan masyarakat serta untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pendapatan daerah, serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha.

Pada sektor kehutanan, kebijakan daerah maupun nasional harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan, serta mengutamakan pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, memelihara tata air dan memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, meningkatkan sumber pendapatan Negara dan devisa serta memacu pembangunan daerah, khususnya di Kalimantan Selatan.

Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem, pengelolanya harus ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk menjaga dan memelihara fungsi tanah, air, udara, iklim dan lingkungan hidup serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sehingga daerah yang tadinya hanya dapat memproduksi secara terbatas dan hanya untuk memenuhi kebutuhan minimal masyarakatnya dapat menikmati hasil yang lebih baik karena revolusi hijau.

Melalui gerakan revolusi hijau Paman Birin, pembangunan lingkungan hidup harus berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi dan diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan, karena pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang rusak dan terganggu keseimbangannya, dengan gerakan revolusi hijau kembali berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan dan penegakkan hukum untuk mengurangi terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus ditingkatkan. Pemerintah nasional dan pemerintah daerah harus bersama-sama, bahu membahu dalam rangka menjaga kerusakan dan pencemaran lingkungan ini.

### **Kesimpulan**

Kebijakan revolusi hijau Paman Birin dalam rangka menjaga kerusakan lingkungan di Kalimantan Selatan memberikan enam dampak utama bagi sosial dan ekonomi masyarakat. 1) kebijakan "revolusi hijau" bertujuan untuk menjaga lingkungan ke depan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2) Memberikan lapangan kerja bagi para petani maupun buruh pertanian. 3) berupaya melakukan pemulihan kerusakan kawasan hutan dan lahan ini sebagai bagian dari upaya menjadikan daerah Kalimantan Selatan sebagai salah satu paru-paru dunia. 4) selaku Gubernur Kalimantan Selatan selalu memberikan dukungan dan apresiasi yang tinggi pada setiap ada kegiatan penghijauan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan OPD terkait maupun LSM serta masyarakat. 5). melakukan revitalisasi persemaian permanen untuk dimanfaatkan agar generasi milenial dapat melakukan edukasi pembibitan dan mendukung Revolusi Hijau di Kalimantan Selatan. 6) Memperbaharui diri dengan gerakan menanam sejuta pohon harus terus menerus digalakkan dan terpelihara. Pembangunan kehutanan harus makin diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan hutan bagi industri dalam negeri, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal (2016) *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Abidin, Said Zainal (2008) *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan Dan Ekonomi Politik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Cornea. M. Michael (Editor) (1988) *Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan. Variable-variabel Sosiologi di dalam Pembangunan Pedesaan*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Dunn, William N. (2003) *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fatah, Luthfi (2007) *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Pustaka Banua. Banjarmasin.
- Fischer, Frank. Gerald J. Miller, Mara S. Sidney (2015) *Handbook Analisis Kebijakan Publik, Teori, Politik dan Metode*. Bandung: Nusa Media.
- Gulo, W. (2010) *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hardjasoemantri, Koesnadi (1997) *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Muchtar, Masrudi (2017) *Pidana Lingkungan*. Yogyakarta: Thema Publishing.
- Sugiyono (2007) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta
- Suharto, Edi (2008) *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (welfare state) di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Bappeda Kalimantan Selatan (2017) *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan*, Banjarmasin: Bappeda Prov Kalimantan Selatan
- Theresia, Aprilia. Krisnha S. Andini, Prima GP. Nugraha dan Totok Mardikanto. (2014) *Pembangunan Berbasis Masyarakat. Acuan Bagi Praktisi, Akademisi dan pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung:Alfabeta.